

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sobirin. 2007. *Budaya Organisasi: Pengertian, makna dan aplikasinya dalam kehidupan organisasi*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Azhar Kasim. 1995. *Teori Pembuatan Keputusan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bagir Manan dan Kuntana, Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Fence M. Wantu. 2001. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hani Handoko. 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditama.
- A.Salusu. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Muhammad Fauzan. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah. Edisi revisi*. Purwokerto. STAIN Press.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Patuan Sinaga. 2001. *Hubungan Antara Kekuasaan Dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Philipus M. Hadjon. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Surabaya: UNAIR.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- R. Wiyono. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies SN. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke -1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian. 2003. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bina Aksara.
- Siswanto Sunarto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: Sinar Grafika.
- Sondang. P. Siagian. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sujamto. 1990. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

B. Jurnal/Tesis

- Alex Sentosa, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman online", *Tesis*, UIN Palangkaraya, 2021.
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", *Law Jurnal* Vol. 2 No. 1, JAN-JUNE (2022).
- Mailadatul Mufallihah, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Islam)", *Tesis*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.
- Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, Debora, jurnalnya yang berjudul "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online

(*Fintech*)”, *Jurnal PATIK: Jurnal Hukum*, Volume 09 Nomor 03, Desember 2020, Page: 147 – 159, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2020.

Subhan Zein, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*Peer To Peer Lending/Crowdfunding*) di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* Vol. 4, No. 2, Juni 2019.

C. Kamus

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Depdiknas. Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

----- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

----- PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/> . diakses pada 16/07/2022 pukul 17.50 Wib.

Kominfo, “Fintech Lending langgar aturan lakukan persekusi digital”, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/13541/fintech-lending-langgar-aturan-lakukan-persekusi-digital/0/sorotan_media, tanggal akses 21 Mei 2023.

Kemkominfo, “341 Fintech Ilegal Sudah Diblokir Kemkominfo”, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/15350/341-fintech-ilegal-sudah-diblokir-kemkominfo/0/sorotan_media, tanggal akses 11 Juni 2023.

OJK, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 5 Januari 2023”, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari-2023.aspx>, tanggal akses 10 Juni 2023.